

IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN BARABAI

Septhia, Murdiansyah Herman, Fika Fibriyanita.

Ilmu Administrasi Publik,63201,Fisip,Uniska,16120103
Ilmu Administrasi Publik,63201,Fisip,Uniska, 1105026401
Ilmu Administrasi Publik,63201,Fisip,Uniska, 1106036001

ABSTRAK

SEPTHIA, NPM. 16120103 "*Implementasi program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Barabai*". Bimbingan Bapak Dr. Murdiansyah Herman, S.Sos. M.AP sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Fika Fibriyanita, S.Sos. M.AP sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana pelaksanaan kebijakan dari program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Barabai, dan mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Barabai.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi kepada 5 orang yaitu : Satu pegawai dinas perdagangan serta empat masyarakat sebagai informan kunci. Sampel ditentukan dengan menggunakan Teknik sampling purposive. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Barabai sudah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang tidak sesuai tapi cukup berpengaruh dan masih perlu diperbaiki agar kedepannya program ini terus berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi, program kredit usaha rakyat

ABSTRACT

SEPTHIA, NPM. 16120103 "*Implementation of the people's business credit program in developing micro, small and medium enterprises in Barabai District*". Guidance of Mr. Dr. Murdiansyah Herman, S.Sos. M.AP as the Main Advisor and Mrs. Fika Fibriyanita, S.Sos. M.AP as Co Advisor.

The purpose of this study is to find out an overview of how the policy implementation of the people's business credit program in developing micro, small and medium enterprises in Barabai District, and to find out what are the obstacles in the implementation of the people's business credit program in developing micro, small and medium enterprises in Barabai District.

The research method used a qualitative approach with qualitative descriptive research. Methods of data collection through interviews and documentation to 5 people, namely: One trade official and four people as key informants. The sample was determined using purposive sampling technique. Data analysis used data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

The results showed that the implementation of the people's business credit program in developing micro, small and medium enterprises in Barabai District has been carried out well. However, there are several obstacles that are not appropriate but quite influential and still need to be fixed so that in the future this program will continue.

Keywords: Implementation of the people's business credit program

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masalah yang ada di Indonesia. Sumber daya manusia yang masih minim sehingga sulit mendapatkan sumber penghasilan serta kebutuhan ekonomi yang mendesak menjadikan perekonomian masyarakat menjadi sangat lemah. Ini merupakan hal yang selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dari masa ke masa.

Melalui program Kredit Usaha Rakyat dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dapat menciptakan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sector riil dan memberdayakan UMKM. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk membantu permodalan UMKM pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon dari instruksi presiden No.6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, khususnya dibidang reformasi sektor keuangan. Instruksi presiden tersebut ditindaklanjuti dengan ditanda tangani nota kesepahaman bersama antara presiden, lembaga penjamin dan perbankan pada tanggal 09 oktober 2007. Sebagaimana kemudian diubah menjadi addendum pada tanggal 14 mei 2008 tentang penjamin kredit atau pembiayaan

pada UMKM dan koperasi atau yang lebih dikenal dengan istilah KUR. Program KUR mendapatkan apresiasi tinggi oleh masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pemerintah Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian perkembangan usaha mikro kecil menengah masih mengalami masalah dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah yang sampai kini menjadi kendala dalam perkembangan usaha mikro kecil dan menengah antara lain adalah keterbatasan modal dan sulit mengakses sumber permodalan. Melalui kredit usaha rakyat, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memperoleh akses kredit yang dapat digunakan sebagai modal untuk memulai dan membuka usaha baru atau mengembangkan usaha sehingga semakin produktif.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulisungai Tengah”***.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Berdasarkan pendapat Edward III (1980: 10) yang mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi, maka definisi konseptual variabel penelitian Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana.

Menurut George C Edwards III menjelaskan bahwa :

Model implementasi kebijakan ini berspektif *top down*. Subarsono (2011:90) berpendapat bahwa faktor faktor keberhasilan implementasi birokrasi. Faktor faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang di inginkan maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektornik, sosial dll.

2. Sumberdaya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumberdaya yang dimiliki oleh implementator. sumber daya mempunyai

peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya,

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan, oleh karena itu perlu nya SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaku pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat).

2.4 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, penerima KUR terdiri dari UMKM, calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, calon pekerja magang di luar negeri, anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa deskriptif.

Lokasi Penelitian

- Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Barabai Kabupaten HST yang beralamat Jln. Brigjen H. Hasan Basri Rt.09 Rw.03.
- Sumber Data Primer Dan Sekunder
- Informasi dari masyarakat yang menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat.
- Informasi dari Dinas Perdagangan.
- Informasi dari Pengelola usaha mikro, kecil dan menengah.
- Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti buku, jurnal, majalah ilmiah dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait masalah implementasi Program Kredit Usaha Rakyat dalam Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.

Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

- Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
- Analisis data dengan proses seleksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BARABAI

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menggunakan teori Edward III :

A. Komunikasi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula artinya adalah kebijakan yang disampaikan kepada sasaran kebijakan dilakukan dengan cara sosialisasi agar masyarakat dapat memahami.

Sosialisasi menjadi alat komunikasi yang dilakukan oleh dinas perdagangan di kecamatan Barabai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci bapak Aris selaku pengawas pengembangan usaha tersebut bahwa peraturan yang dibuat oleh Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sudah dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah daerah kepada setiap kelurahan semenjak dikeluarkannya peraturan tersebut. Selain sosialisasi pemerintah daerah juga mengadakan seminar dalam rangka mengembangkan usaha. *“setelah adanya peraturan tersebut kami dari dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat yaitu pelaku usaha dan melaksanakan seminar-seminar yang isinya pembekalan dalam mengembangkan usaha”* (05/07/2020)

B. Sumber Daya, khusus nya Sumber Daya Anggaran : Dalam melaksanakan kebijakan dalam mencapai tujuan maka sumber daya anggaran harus ada dan sesuai agar program terlaksana dengan baik. Sumber saya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program KUR dalam pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah di Barabai dalam mendukung kebijakan tersebut informan kunci Bapak Husaini dan Bapak Muhammad menyatakan :*“sebelum pencairan dananya atau menrima bantuan pinjaman modal dari Bank, disini saya harus melakukan beberapa prosedur dan melengkapi persyaratannya yang sudah ditetapkan dan mengajukannya ke Bank. Dari pihak Bank akan melakukan pengecekan, apakah usaha saya adalah usaha yang produktif. Jika sudah sesuai dengan persyaratan tersebut,baru pencairan dana”*(05/08/2020).

“kalo besaran dana nya itu sendiri,saya yang punya usaha ini yang tentukan perlunya berapa. Makanya dari pihak Bank datang kerumah untuk mencek usaha saya” (05/08/2020)

Dari pernyataan di atas juga didukung oleh Bapak Aris selaku pengawas program KUR. *“Untuk anggaran program KUR itu sendiri memang dari Bank,kami disini hanya mengelola dan mengawasi jalannya program. Oleh karna itu kami bekerjasama dengan beberapa pihak bank penyalur yang layak dan sudah memenuhi persyaratan dari pemerintah sebagai pihak penyalur.* (05/08/2020).

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sumber daya anggaran program kredit usaha rakyat dalam pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah di Barabai memang sudah ada anggarannya melalui pihak Bank sebagai penyalur dana yang sudah bekerjasama dengan pemerintah,dengan cara peminjaman modal usaha.

C.Disposisi dapat diketahui bahwa para informan menjelaskan tentang program kredit usaha rakyat dalam pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah di Barabai itu berjalan dengan baik sesuai apa yang dikehendaki oleh implementator

atas program itu, bisa dibilang program ini sudah mencapai tujuannya.

Disposisi atau kecenderungan atau tingkah laku dari pelaksana kebijakan. Pelaksanaan kebijakan harus mengetahui apa yang dilakukan dan juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi penyimpangan. Sikap dari informan kunci Bapak Husaini dan Bapak Muhammad dalam menanggapi adanya program kredit usaha rakyat dalam pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah menyatakan :

“Dengan adanya program ini saya sangat terbantu dalam mengembangkan usaha saya melalui peminjaman modal,hanya saja diberatkannya pada bunga tiap bulannya. saya berharap pelaku usaha yang lain dapat memanfaatkan program ini untuk mengembangkan usahanya”(05/08/2020).

Penjelasan tersebut didukung oleh Bapak Aris sebagai pengawas program KUR dikecamatan Barabai mengatakan :

“bagi saya program ini baik untuk membantu masyarakat yang mau mengembangkan usahanya. Akan tetapi masih ada pelaku usaha yang dibantu melalui program ini merasa keberatan dengan bunga tiap bulannya”(05/08/2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa para informan menjelaskan tentang program kredit usaha rakyat dalam pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah di Barabai itu berjalan dengan baik sesuai apa yang dikehendaki oleh implementator atas program itu, bisa dibilang program ini sudah mencapai tujuannya.

D.Struktur Birokrasi peneliti mengambil kesimpulan bahwa dinas perdagangan di kecamatan Barabai sudah menjalankan SOP sebagaimana seharusnya yang sudah dikeluarkannya peraturan Presiden dan Menteri koordinator perekonomian tentang program KUR dalam pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh

yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Pemimpin struktur birokrasi dalam implementasi program KUR dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Barabai yang memiliki karakteristik yang mendorong kinerja birokrasi yaitu SOP (standar operasional prosedur) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.

Dalam hasil wawancara dengan informan kunci yaitu Bapak Aris dan Bapak Husaini :

“dalam pengerjaan ini sudah sesuai dengan arahan dan prosedur dari atasan, sehingga jarang terjadi kesalahan dilapangan”(05/08/2020)

“dalam mengelola usaha ini saya bersama teman-teman yang lain sudah mengikuti apa-apa saja yang di arahkan dari pihak dinas perdagangan dan pihak Bank”(05/08/2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dinas perdagangan di kecamatan Barabai sudah menjalankan SOP sebagaimana seharusnya yang sudah dikeluarkannya peraturan Presiden dan Menteri Koordinator perekonomian tentang program KUR dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam menjalankan kebijakan tersebut.

2.KENDALA DALAM PENGIMPLEMENTASIAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,KECIL, DAN MENENGAH DI BARABAI

Ada beberapa kendala dalam pengimplemetasian program kredit usaha rakyat dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Barabai, yang pertama faktor sumber daya yang meliputi tiga aspek yaitu kendala dalam sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Yang pertama sumber daya manusia yang dimana SDM di kecamatan Barabai tidak mendukung dalam pelaksanaan program KUR ini, hanya ada satu orang saja yang mengkoordinir langsung ke masyarakat.

Yang kedua dari aspek sumber daya anggaran yaitu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah seberapa besar untuk program KUR ini untuk masyarakat tidak langsung dari pemerintah melainkan melalui Bank sebagai pihak penyalur.

V. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan program kredit usaha rakyat dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sudah cukup optimal dan tepat sasaran, dan pihak dinas perdagangan selalu berkoordinasi kepada pihak Bank BRI yang sekaligus juga pelaksana dari program tersebut sehingga sejauh ini program tersebut bisa dianggap berhasil untuk membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya melalui peminjaman modal.

Walaupun masih ada beberapa kendala dan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kredit usaha rakyat dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu : Yang pertama faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KUR ini, hanya ada satu orang saja yang mengkoordinir. Yang kedua sumber daya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah seberapa besar untuk program KUR.

Saran

1. Mengoptimalkan Sumber Daya dalam pelaksanaan program KUR dengan cara memperbanyak sumber daya manusia dalam mengelola program ini khususnya di kantor dinas perdagangan kecamatan Barabai agar dalam pelaksanaan program tersebut lebih efektif.

2. Mengkaji kembali persyaratan pengajuan kredit usaha rakyat sehingga lebih meringankan pelaku usaha dalam memperoleh bantuan usaha dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif :Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Edisi 04. Rajawali Pers. Depok

Budi winarno. 2012. *Kebijakan Publik : Teori,Proses dan Studi Kasus*. Edisis 02. CAPS. Yogyakarta

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : konsep, teori dan aplikasi*. Edisi 05. Pustaka Pelajar.Yogyakarta

Undang-undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 /Pmk.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat.

Jurnal

Helmidani Novi, Puryanto, *“Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha Mikro,Kecil dan*

Menengah di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, “. *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol.1 No.4 tahun 2019, h. 1 diakses pada hari rabu tanggal 13 November 2019 pukul 04.45 WITA.

Keles Dantje, Montolalu Johny, Moku Yohana Oliviva, *“ Pemanfaatan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) terhadap peningkatan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM),* “. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.6 No.1 tahun 2018, h. 1 diakses pada hari rabu tanggal 13 November 2019 pukul 05.10 WITA.

Sudarmi, Adys Kadir Abd, Hardiyanti, *“ Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang,* “. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.5 No.2 (Agustus 2019), h. 1.diakses pada hari rabu tanggal 13 november 2019 pukul 05.21 WITA.

Skripsi

Huda Misbachul. 2019. *“Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KC Madiun”* (skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institute Agama Islam Negeri Ponorogo. Diakses pada hari rabu tanggal 13 november 2019 pukul 04.29 WITA.

Maesya A.A . 2017. *“ Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak”* (skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Diakses pada hari rabu tanggal 13 November 2019 pukul 04.50 WITA.